

LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA
TAHUN 2025



PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

Jl. Kebon Sirih No. 11 L-M Jakarta Pusat
TELEPON: 021-21230661

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa
Alamat	Jl Kebon Sirih Raya No. 11 L- M Jakarta Pusat 10340
Nomor Telepon	021-21231704

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Bahana Ekonomi Sentosa memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Bahana Ekonomi Sentosa dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Jakarta. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Bahana Ekonomi Sentosa didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Bahana Ekonomi Sentosa

BPR Bahana Ekonomi Sentosa telah beroperasi lebih dari 6 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesenjangan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Bahana Ekonomi Sentosa selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Bahana Ekonomi Sentosa terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:



Dengan Peringkat Komposit 2 (Baik), dapat disimpulkan bahwa kondisi tata kelola berada dalam keadaan sehat, namun tetap diperlukan upaya penyempurnaan secara berkesinambungan guna meningkatkan efektivitas penerapan GCG dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Indra Novandi
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. <p>Liliany</p>		
2.	Nama	Tiara Respati
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. 		
3.	Nama	Liliany
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan adalah sebagai</p>		

berikut:

- a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan
- b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain
- d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar tidak menyimpang dari ketentuan
- e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain
- f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Melakukan review SOP
2. Penyelesaian kredit bermasalah
3. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK tahun 2024
4. Monitoring terhadap laporan baik internal maupun eksternal
5. Peningkatan kompetensi Karyawan
6. Meningkatkan produktifitas kinerja baik funding maupun lending

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Joni Mulyawan
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksib. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bankc. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaand. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.	
2.	Nama	Yepi Hendarman
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksib. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bankc. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan	



d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Melakukan review SOP
2. Penyelesaian kredit bermasalah
3. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK tahun 2024
4. Monitoring terhadap laporan baik internal maupun eksternal
5. Peningkatan kompetensi Karyawan
6. Meningkatkan produktifitas kinerja baik funding maupun lending

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

1.	Komite	01. Komite Audit
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Jumlah Rapat	0
Program Kerja Komite:		
-		
Realisasi Program Kerja Komite:		
-		
2.	Komite	02. Komite Pemantau Risiko
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Jumlah Rapat	0
Program Kerja Komite:		
-		
Realisasi Program Kerja Komite:		
-		
3.	Komite	03. Komite Remunerasi dan Nominasi
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Jumlah Rapat	0
Program Kerja Komite:		
-		

Realisasi Program Kerja Komite:

-

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:
cukup jelas melihat modal inti BPR

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Indra Novandi
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Tiara Respati
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Liliany
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Jony Mulyawan
	Persentase Kepemilikan (%)	1,78
2.	Nama	Yepi Hendarman
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

-

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Indra Novandi
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

	Nama	Tiara Respati
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Liliany
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Joni Mulyawan
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Yepi Hendarman
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Jony Mulyawan
	Nama Bank/Perusahaan Lain	BPR Panjawan Mitra Usaha
	Persentase Kepemilikan (%)	7,85

Cukup Jelas

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Indra Novandi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Tiara Respati
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Liliany
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Nihil

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Indra Novandi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Tiara Respati
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Liliany
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Joni Mulyawan
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Yepi Hendarman
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada



Direksi Lain di BPR	
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp919.560.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp841.400.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp84.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang



Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp208.660.000
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp146.900.000

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	3 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Cukup jelas

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 5,30 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,97 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,53 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 1,28 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,19 : 1

Cukup jelas

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat 26 Maret 2025

Jumlah Peserta 5 orang

Topik/Materi Pembahasan:

- Evaluasi terhadap kinerja Direksi
- Rencana Bisnis BPR
- Isu-isu strategis
- Evaluasi/penetapan kebijakan strategis
- Evaluasi realisasi RBB

2. Tanggal Rapat 19 Juni 2025

Jumlah Peserta 5 orang

Topik/Materi Pembahasan:

- Evaluasi terhadap kinerja Direksi
- Rencana Bisnis BPR
- Isu-isu strategis

	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi/penetapan kebijakan strategis • Evaluasi realisasi RBB 	
3.	Tanggal Rapat	29 September 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap kinerja Direksi • Rencana Bisnis BPR • Isu-isu stretegis • Evaluasi/penetapan kebijakan strategis • Evaluasi realisasi RBB 	
4.	Tanggal Rapat	30 Desember 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap kinerja Direksi • Rencana Bisnis BPR • Isu-isu stretegis • Evaluasi/penetapan kebijakan strategis • Evaluasi realisasi RBB 	

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Pengurus di masa mendatang.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Joni Mulyawan
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Yepi Hendarman
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

cukup jelas

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus



Hukum Pada Tahun Laporan

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	---------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
-----------------------------------	---------

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
---------------------------------------	---------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
--	---------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
---	---------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	---------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
--	---------

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	---------

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	---------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
-----------------------------------	---------

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
---------------------------------------	---------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
--	---------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
---	---------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	---------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
--	---------

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus
--------------------------------------	---------

Hukum Pada Tahun Laporan

tidak ada penyimpangan internal.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
--	---------

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	2 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
--	---------

Permasalahan hukum yang masih dalam proses yaitu :

1. Andika Kusuma Atmaja
2. PT Guna Utama Energi

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada benturan kepentingan.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

-

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA Semester II Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA selama semester II tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Handwritten signature

Jakarta, 26 Januari 2026

 **PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA**



Liliany

Direktur Operasional YMFK



Tiara Respati

Direktur Bisnis



Indra Novandi
Direktur Utama

Mengetahui,



Jony Mulyawan
Komisaris Utama



Yepi Hendarman
Komisaris